

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

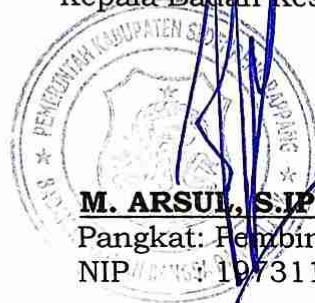
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2026 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



M. ARSUL, S.IP., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP: 19731123 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	52
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	52
3.2 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	60
BAB V PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	11
Tabel T-C 30 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.....	30
Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang	34
Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (RENJA) memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana RENJA menterjemahkan RPJMD dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kesbangpol Renstra ke dalam rencana, program dan anggaran. RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmoni RENSTRA ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur dimana RENJA sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD. Rencana Kerja tahun 2026 disusun dengan menyesuaikan kondisi negara pada saat ini yang terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami koreksi ke bawah. Dampak tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi kebijakan Kota Salatiga dan secara otomatis juga mempengaruhi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Diharapkan nantinya Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dimulai dengan penyusunan rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Juli tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu pertama bulan Juli. Selanjutnya, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2026 dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, maka penyusunan rancangan awal renja Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempedomani Renstra Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2025-2029.

Visi Kepala Daerah yang terpilih adalah : “*Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan Kebijakan mendasari misi ke 5 yaitu “*Mewujudkan kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Kondusi, Berbudaya, Beradat dan Religius.*”

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2026 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- j) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang

daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- k) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- l) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- m) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD Tahun 2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2026,
- b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas:

❖ **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

❖ **Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

❖ Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

❖ Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

❖ Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- ❖ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- Jenis indikator yang dikaji, dja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- ❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:
- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- ❖ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- ❖ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
- Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH , terdiri atas:

- ❖ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- ❖ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, terdiri dari:

- ❖ Program dan Kegiatan
- Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Misal:
 - a. Jumlah Program dan kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024 dan 2025 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2024, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peraangkat daerah.
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat
- ✓ Administrasi Umum Perangkat
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2024 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan seperti pada kegaitan: pemeliharaan kendaraan dinas/operasional,

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

TABEL T.C. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	100	100	100	100%	100		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	2	2	2	100%	2	6	67%

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1	1	1	100%	1	3	33%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dok	2	2	2	100%	2	6	33%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1	2	2	100%	1	1	100%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dok	2	2	2	100%	2	6	33%
	2. KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 org/bln	185	252	185	73%	252	622	41%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4	4	4	100%	4	12	33%
	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1	0	0%	1	1	100%
	3. KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %					100	100	
	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	100	34	34	100%	20	154	16%
	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	150	120	90	75%	120	360	35%

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	4. KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%							
	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	10	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	Paket	0	0	0	0%	0	0	0%
	5. KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%						0	
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130	Laporan	395	220	220	100%	120	735	18%
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24	12	12	100%	12	48	25%
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	24	12	12	100%	12	48	25%
	6. KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100	%						0	
	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	14	11	11	100%	11	36	31%
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	12	11	4	36%	11	27	41%
	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	15	24	22	92%	15	52	29%
	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	Unit	1	1	0	0%	0	1	100%

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/ Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	50	%							
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	80	%							
SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Porgram Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	3	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%
SUB KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	3	dok	0	0	0	0%	0	0	0%
SUB KEGUATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70	orang	0	630	60	10%	0	60	86%
SUB KEGUATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70	orang	0	630	50	8%	50	100	143%
SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan,	3	Lap	0	0	0	0%	0	0	0%

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
	SUB KEGIATAN Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	6	Lap	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	90	orang	0	0	0	0%	70	70	78%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100	%							
	1. KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilah pemula	100	%							
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	11	Dok	0	11	11	100%	13	24	46%

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

			Daerah									
		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	orang	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Pengawasan	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	80 %									
	1. KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	80 %									
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	140 Orang	260	0	0	0%	0	260	54%		
	SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	18 Orang	0	0	0	0%	0	0	0%		
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitirong Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	12 Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%		

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah								
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95	%						
1.	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	95	%						
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	Dok	0	0	0	0%	0	0
	SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	Dok	0	0	0	0%	0	0
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	630	Orang	0	630	150	24%	630	780

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi, di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Laporan	0	2	2	100%	3	5	167%
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100	%							
	1. KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100	%							
	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	Dok	0	0	0	0%	0	0	0%

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan	240	Orang	0	0	0	0%	0	0	0%
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Dok	24	12	12	100%	12	48	25%

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M. ARRSUL, S.IP., M.Si
NIP. 19731123 199302 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Jabatan Kelompok Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik;

- d. pelaksanaan administrasi Badan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Merencanakan Program Kerja Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- j. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- m. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- n. menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- o. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan karakter bangsa;
- p. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang politik dalam negeri;
- q. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan;
- r. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Badan;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonperintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan;
- v. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyipian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

- i. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilandan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:
- o. Menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- p. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- q. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- r. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- s. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- u. Melaksanakan perumusan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- v. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- w. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;

- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing;
- y. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- z. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Bidang politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesatuan bangsa.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi lembaga bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. Melaksanakan perumusan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- h. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- i. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kesatuan bangsaperumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 dan perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL T-C.30
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol						Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pesentase Penyelesaian Konflik SARA, POLEKSOSBUD)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
2.	Indeks Harmoni Indonesia			67.25%	69.87%	72.49%	74.11%	77.73%	80.35%	0%				
3.	Pesentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Dilaksanakan			75%	90%	90%	90%	100%	100%	-	-			
4.	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-			
5.	Tingkat kepatuhan ormas terhadap peraturan Perundang-undangan			45.93%	53.33%	60.74%	68.15%	75.56%	82.96%	-	-			
6.	predikat Nilai Sakip			66,67	66,70	70	70,20	70,30	70,40	66,55	-			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

A. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

B. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Ketidakstabilannya harga bahan pokok
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4.397.029.000					4.911.729.000	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.397.029.000					4.911.729.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	2.055.029.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	2.088.029.000	
1	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	15.500.000	1. KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	15.500.000	
1.1	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	3.000.000	1.1 SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	3.000.000	

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	2.500.000	1.2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	2.500.000
1.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	1.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000
1.4	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 dok	2.000.000	1.4	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 dok	2.000.000
1.5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.000.000	1.5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.000.000
1.6	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 dok	3.000.000	1.6	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 dok	3.000.000
2	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.613.979.000	2	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.613.979.000
2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	1.606.979.000	2.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	1.606.979.000

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 lap	6.000.000	2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 lap	6.000.000
2.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1.000.000	2.3	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1.000.000
3	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	91.586.000	3	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	91.586.000
3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4.500.000	3.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4.500.000
3.3	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127 Laporan	87.086.000	3.3	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127 Laporan	87.086.000
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	40.000.000	4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	40.000.000
4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	5 Paket	10.000.000	4.1	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	5 Paket	10.000.000
4.2	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Paket	30.000.000	4.2	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Paket	30.000.000
5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	173.500.000	5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	206.500.000

5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	3.500.000	5.1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	3.500.000
5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	5.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000
5.3	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.000.000	5.3	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	173.000.000
6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 %	120.464.000	6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100 %	120.464.000
6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	73.200.000	6.1	SUB KEGIATAN Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	73.200.000
6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	7.264.000	6.2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	7.264.000
6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	20.000.000	6.3	SUB KEGIATAN Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	20.000.000

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.4	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	20.000.000	6.4	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	20.000.000
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	80 %	459.000.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		Persentase Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	80 %	674.000.000
KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	80 %	459.000.000	KEGIATAN Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa	80 %	674.000.000
1.1	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	1 Dokumen	6.000.000	1.1	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	1 dokumen	6.000.000
1.2	SUB KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 Dokumen	6.000.000	1.2	SUB KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya jumlah Masyarakat yang dapat merubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup	1 dokumen	6.000.000

<p>1.3 SUB KEGUATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>70 Orang</p>	<p>6.000.000</p>	<p>1.3 SUB KEGUATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>70 Orang</p>	<p>6.000.000</p>
<p>1.4 SUB KEGUATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>70 Orang</p>	<p>6.000.000</p>	<p>1.4 SUB KEGUATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>70 orang</p>	<p>56.000.000</p>
<p>1.5 SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>1 laporan</p>	<p>6.000.000</p>	<p>1.5 SUB KEGIATAN Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>1 laporan</p>	<p>6.000.000</p>

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.6	SUB KEGIATAN Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengalaman pancasila dan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengalaman pancasila dan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1 Keluarga	5.000.000	1.6	SUB KEGIATAN Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengalaman pancasila dan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengalaman pancasila dan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1 Keluarga	5.000.000
1.7	SUB KEGIATAN Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 laporan	6.000.000	1.7	SUB KEGIATAN Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 laporan	6.000.000
1.8	SUB KEGIATAN Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	55 orang	400.000.000	1.8	SUB KEGIATAN Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	55 orang	565.000.000
1.9	SUB KEGIATAN Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	1 Dok	6.000.000	1.9	SUB KEGIATAN Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila	1 Dok	6.000.000
1.10	SUB KEGIATAN Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka duta pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka duta pancasila	1 Dok	6.000.000	1.10	SUB KEGIATAN Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka duta pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka duta pancasila	1 Dok	6.000.000
1.11	SUB KEGIATAN Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah purna paskibraka duta pancasila	55 Orang	6.000.000	1.11	SUB KEGIATAN Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah purna paskibraka duta pancasila	55 Orang	6.000.000

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100 %	930.000.000	PROGRAM Peningkatan Peran artai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan sumber daya manusia partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100 %	1.018.700.000
KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilah pemuda	100 %	930.000.000	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilah pemuda	100 %	1.018.700.000
SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwaki lan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakila n dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen	6.000.000	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw akilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakila n dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen	6.000.000

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</p>		<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakila n dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>6.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakila n dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>4 dokumen</p>	<p>6.000.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>100 Orang</p>	<p>900.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>100 Orang</p>	<p>988.700.000</p>

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>30 Orang</p>	<p>6.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>30 Orang</p>	<p>6.000.000</p>
<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>4 Laporan</p>	<p>6.000.000</p>	<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>4 Laporan</p>	<p>6.000.000</p>
<p>Pelaksanaan tugas Paskibraka</p>	<p>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka</p>	<p>1 kegiatan</p>	<p>6.000.000</p>	<p>Pelaksanaan tugas Paskibraka</p>	<p>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka</p>	<p>1 kegiatan</p>	<p>6.000.000</p>

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	80 %	30.000.000	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat dan masyarakat Yang Diberdayakan	80 %	30.000.000
KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	80 %	30.000.000	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat	80 %	30.000.000
SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	6.000.000	SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	6.000.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 dokumen	6.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 dokumen	6.000.000

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	100 Orang	6.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	100 Orang	6.000.000	
	SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	25 orang	6.000.000		SUB KEGIATAN Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	25 orang	6.000.000	
	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Pelanitronng Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	5 Laporan	6.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Pelanitronng Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Orang Asing di Daerah	5 Laporan	6.000.000	
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya		Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90 %	224.000.000		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya		Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90 %	318.000.000	

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<p>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p>	<p>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p>	<p>90 %</p>	<p>224.000.000</p>	<p>KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p>	<p>Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p>	<p>90 %</p>	<p>318.000.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>6.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>6.000.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</p>	<p>2 dokumen</p>	<p>6.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</p>	<p>2 dokumen</p>	<p>6.000.000</p>

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>150 Orang</p>	<p>6.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>150 Orang</p>	<p>100.000.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>150 Orang</p>	<p>6.000.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>150 Orang</p>	<p>6.000.000</p>

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	200.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan	200.000.000	
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100 %	699.000.000		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100 %	783.000.000	
	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	699.000.000		KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	783.000.000	

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>4.500.000</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>4.500.000</p>
<p>SUB KEGIATAN Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>4.500.000</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>4.500.000</p>

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>50 Orang</p>	<p>4.500.000</p>	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>50 Orang</p>	<p>4.500.000</p>	
	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan</p>	<p>240 orang</p>	<p>6.000.000</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan</p>	<p>240 orang</p>	<p>90.000.000</p>	

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	<p>SUB KEGIATAN Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>4.500.000</p>	<p>Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>12 Laporan</p>	<p>4.500.000</p>
	<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>12 Dokumen</p>	<p>675.000.000</p>	<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>12 Dokumen</p>	<p>675.000.000</p>

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis”, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Menigkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan
- 2) Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisifatip dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan
- 3) Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan Daerah
- 4) Menigkatnya Kualitas Tata Kelolah Keuangan dan Kinerja

3.2 Program dan Kegiatan

untuk target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 3) Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

➤ Program Penguatan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan: Peumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaanbidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologin wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya

- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
 8. Pembentukan paskibraka
 9. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
 10. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
 11. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Pemantauan Situasi Budaya Politik
- Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- Sub kegiatan:
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6. Pelaksanaan tugas Paskibraka

➤ Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

➤ program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

➤ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di butuhkan pada tahun 2026 untuk Belanja sebesar Rp. 4.911.729.000, dan diperkirakan pada tahun 2027 sebesar Rp. 4.950.812.450 dimana sumber pendanaanya bersumber dari APBD Kab. Sidenreng Rappang.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN****Program dan kegiatan**

Pelaksanaan program/kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2026 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenrang Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2026 dan perkiraan maju pada tahun 2027 dapat di uraikan pada tabel berikut

TABEL T-C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.911.729.000,00				4.950.812.450,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4.911.729.000,00				4.950.812.450,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.911.729.000,00				4.950.812.450,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-		80%	674.000.000,00			85%	674.000.000,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		80%	674.000.000,00		-	85%	674.000.000,00
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>		1 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>		1 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		70 Orang	56.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	70 Orang	56.000.000,00
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		70 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	70 Orang	6.000.000,00
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>		1 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	6.000.000,00
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>		1 Keluarga	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Keluarga	5.000.000,00
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka								
		<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>		1 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka								
		<i>Jumlah Paskibraka</i>		55 Orang	565.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	55 Orang	565.000.000,00
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila								
		<i>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>		1 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila								
		<i>Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>		1 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila								
		<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>		55 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	55 Orang	6.000.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-		100%	1.018.700.000,00			100%	1.023.700.000,00

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-		100%	1.018.700.000,00		-	100%	1.023.700.000,00
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>		4 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	6.000.000,00
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>		4 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	6.000.000,00
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		100 Orang	988.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Orang	993.700.000,00

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		30 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	30 Orang	6.000.000,00
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		4 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	6.000.000,00
8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka								
		<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka</i>		1 Kegiatan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Kegiatan	6.000.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-		80%	30.000.000,00			80%	30.000.000,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		80%	30.000.000,00		-	80%	30.000.000,00
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>		4 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	6.000.000,00
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>		4 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	6.000.000,00
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		100 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Orang	6.000.000,00
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		25 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Orang	6.000.000,00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>		5 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Laporan	6.000.000,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-		85%	318.000.000,00			90%	318.000.000,00

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-		85%	318.000.000,00		-	90%	318.000.000,00
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>		1 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.000.000,00
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>		2 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	6.000.000,00
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		150 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	150 Orang	100.000.000,00
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		150 Orang	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	150 Orang	6.000.000,00
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		6 Laporan	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Laporan	200.000.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-		100%	783.000.000,00			100%	783.000.000,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-		100%	783.000.000,00		-	100%	783.000.000,00
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>		1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	4.500.000,00
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>		1 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	4.500.000,00
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		50 Orang	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	50 Orang	4.500.000,00
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		240 Orang	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	240 Orang	90.000.000,00
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		12 Laporan	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	4.500.000,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>		12 Dokumen	675.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	675.000.000,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	2.088.029.000,00			-	2.122.112.450,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	15.500.000,00		-	-	15.500.000,00

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		4 Dokumen	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		1 Dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	2.000.000,00
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		2 Dokumen	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	2.000.000,00
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		2 Dokumen	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	3.000.000,00
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		4 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	2.500.000,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	1.613.979.000,00		-	-	1.643.062.450,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		252 Orang/bulan	1.606.979.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	252 Orang/bulan	1.636.062.450,00
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		1 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	1.000.000,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		4 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	6.000.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	91.586.000,00		-	-	91.586.000,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		25 Paket	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Paket	4.500.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		127 Laporan	87.086.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	127 Laporan	87.086.000,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	40.000.000,00		-	-	40.000.000,00
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		5 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	10.000.000,00
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		8 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8 Unit	30.000.000,00

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	206.500.000,00	-	-	211.500.000,00
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		60 Laporan	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	60 Laporan 3.500.000,00
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan 35.000.000,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	173.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan 173.000.000,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	120.464.000,00	-	-	120.464.000,00
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		11 Unit	73.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	11 Unit 73.200.000,00
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		11 Unit	7.264.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	11 Unit 7.264.000,00
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		19 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	19 Unit 20.000.000,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

RENCANA KERJA AKHIR 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		1 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	20.000.000,00
J U M L A H					4.911.729.000,00				4.950.812.450,00

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2025 - 2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis”**.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 yaitu: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas demokrasi, dan mengakui dan menghargai peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026.

Semoga penyusunan rencana ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,



M. ARSUL, S.IP., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19731123 199302 1 002